

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka

Penelitian yang berkaitan dengan tingkat kemiskinan yang sudah banyak dilakukan terkait penelitian kuantitatif sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Rasidah Rasyid (2017) dengan judul *“Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan”*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan. Teknik analisis data penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh tidak signifikan dan negatif terhadap tingkat kemiskinan. Sedangkan pengangguran berpengaruh tidak signifikan dan negatif terhadap tingkat kemiskinan.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Windra, Pan Budi Marwoto dan Yudi Rafani (2016) dengan judul *“Analisis Pengaruh Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, dan Tingkat Pengangguran terhadap Kemiskinan di Indonesia”*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat pengangguran-

terhadap kemiskinan di Indonesia. Teknik analisis data penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier berganda dan hipotesis menggunakan uji T dan uji F. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia, pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia. Sementara, tingkat pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Relevansi penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah penggunaan variabel pertumbuhan ekonomi dapat dijadikan variabel independen tetapi penulis menggunakan teknik analisis yang berbeda yaitu data panel.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Tety Martini (2016) yang berjudul “*Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Berau*”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh pendidikan, upah dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi, pengaruh pendidikan, upah, investasi terhadap kemiskinan serta pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendidikan, upah dan investasi terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini menggunakan model analisis jalur (*path analysis*). Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa variabel pendidikan dan upah berpengaruh langsung, positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, investasi berpengaruh langsung, positif dan

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain itu, pendidikan berpengaruh langsung, negatif, dan signifikan terhadap kemiskinan, upah berpengaruh langsung, negatif, dan tidak signifikan terhadap kemiskinan, investasi berpengaruh langsung, positif, dan tidak signifikan terhadap kemiskinan serta pertumbuhan ekonomi berpengaruh langsung, positif, dan tidak signifikan terhadap kemiskinan, pendidikan, upah dan investasi berpengaruh tidak langsung, positif, dan tidak signifikan terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi. Relevansi penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah variabel pertumbuhan ekonomi dapat dijadikan variabel independen karena berkaitan dengan tingkat kemiskinan.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Anzwar dan Achmat Subekan (2016) dengan judul "*Analisis Determinan Kemiskinan di Sulawesi Selatan*". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan. Analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi data panel dengan pendekatan *Random Effect*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi regional berpengaruh tidak signifikan dan positif terhadap kemiskinan, pengangguran berpengaruh negatif terhadap kemiskinan, indeks kesehatan berpengaruh negatif terhadap kemiskinan, angka partisipasi sekolah berpengaruh negatif terhadap kemiskinan dan belanja daerah berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. Sedangkan secara bersama-sama, variabel pertumbuhan

ekonomi regional, jumlah pengangguran, indeks kesehatan, angka partisipasi sekolah dan belanja daerah berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Relevansi penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah variabel pertumbuhan ekonomi dapat dijadikan variabel independen karena berkaitan dengan tingkat kemiskinan.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Lavenia Kotambunan, Sutomo Wim Palar, dan Richard L.H Tumilaar (2016) dengan judul “*Analisis Pengaruh Belanja Modal dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara*”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh belanja modal dan indeks pembangunan manusia terhadap kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara. Analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik *Ordinary Least Square (OLS)* dengan model regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja modal positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Sedangkan indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Relevansi penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah variabel indeks pembangunan manusia dapat dijadikan variabel independen karena berkaitan dengan tingkat kemiskinan.
6. Penelitian yang dilakukan oleh Vinny Alvionita Riva, Hainim Kadir dan Deny Setiawan (2014) dengan judul “*Pengaruh Tingkat Pengangguran dan Tingkat Upah Minimum Provinsi terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Riau*”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk

menguji dampak tingkat pengangguran dan tingkat upah minimum terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Riau. Analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengangguran tidak berpengaruh signifikan terhadap penduduk miskin di Provinsi Riau. Sementara upah minimum provinsi berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Riau. Relevansi penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah variabel upah minimum dapat dijadikan variabel independen karena berkaitan dengan tingkat kemiskinan.

Penelitian diatas mempunyai persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu terletak pada variabel, objek penelitian maupun periode penelitian. Penelitian tersebut mempunyai persamaan yaitu sama-sama meneliti variabel kemiskinan. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian yang dimana pada penelitian yang akan dilakukan meneliti Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan variabel independen pada penelitian ini meliputi pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia, upah minimum, dan inflasi.

B. Kerangka Teoritik

1. Kemiskinan

a. Definisi Kemiskinan

Kemiskinan berarti kekurangan kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat layak. Definisi lainnya yang biasa digunakan adalah menurut *European Union* bahwa kemiskinan sebagai kondisi seseorang dengan sumberdaya (material, sosial dan budaya) yang sangat terbatas (Anonymous tanpa tahun) (Khomsan, 2015: 2). Dengan demikian kemiskinan dapat diartikan sebagai kondisi dimana seseorang kekurangan kebutuhan untuk mencukupi hidup sehari-hari.

Menurut Edwin G. Dolan terdapat tiga pandangan mengenai kemiskinan, yaitu:

- 1) Kemiskinan diartikan sebagai tidak cukupnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan mendasar untuk keberlangsungan hidup (*standar of living*). Standar hidup ini ditetapkan secara objektif.
- 2) Pendapatan yang rendah diukur secara subjektif, yakni relatif rendah terhadap pendapatan orang lain di masyarakat.
- 3) Kemiskinan dihubungkan dengan usaha yang dilakukan untuk menghasilkan pendapatan yang tercukupi.

Secara konseptual, kemiskinan dibedakan menjadi dua macam, yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut yaitu ketidakmampuan seseorang yang dalam memenuhi kebutuhan pokok minimum. Sementara kemiskinan relatif yaitu ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan standar kehidupan yang ditetapkan oleh masyarakat setempat.

b. Ukuran kemiskinan

Kemiskinan merupakan salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk dengan menghitung konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasarnya. Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan garis kemiskinan untuk menghitung jumlah penduduk miskin. Apabila pengeluaran seseorang di atas garis kemiskinan maka orang tersebut tidak tergolong orang miskin. Akan tetapi, apabila pengeluaran seseorang tersebut di bawah garis kemiskinan maka orang tersebut termasuk kelompok orang miskin. Selain itu, definisi garis kemiskinan juga dapat diartikan melalui pendekatan US\$1 atau US\$2 serta melalui pendekatan penghasilan yang dapat memenuhi kebutuhan konsumsi senilai 2.100 kalori per orang.

Metode untuk menghitung garis kemiskinan tersusun dari dua komponen pengeluaran yaitu pengeluaran untuk makanan (garis kemiskinan makanan) dan non makanan (garis kemiskinan non makanan). Garis kemiskinan (GKM) adalah nilai pengeluaran

kebutuhan minimum makanan yang disertakan dengan 2.100 kalori per kapita per hari. Sedangkan Garis kemiskinan non makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk memenuhi sandang, pendidikan, rumah, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya. Perhitungan pada Garis Kemiskinan dilakukan dengan cara terpisah untuk daerah perkotaan dan pedesaan.

Garis kemiskinan dapat juga dikatakan suatu *index*. Secara statistik terdapat beberapa cara dalam menghitung garis kemiskinan meliputi *headcount index*, *poverty gap index*, *poverty severity index* dan sebagainya (Khomsan, 2015: 7). *Headcount Index* digunakan untuk menghitung presentase penduduk miskin yang di bawah Garis Kemiskinan (GK). *Poverty Gap Index* atau Indeks Kedalaman Kemiskinan merupakan indeks yang digunakan untuk mengetahui selisih atau kesenjangan antara rata-rata pendapatan penduduk miskin dengan garis kemiskinan yang diterapkan. Sementara, *Poverty Severity Index* atau Indeks Kearifan Kemiskinan diartikan sebagai indeks yang digunakan untuk mengetahui seberapa parah kemiskinan yang terjadi dengan memperhitungkan juga kesenjangan antara penduduk miskin.

c. Penyebab Kemiskinan

Menurut Sharp, et.al penyebab kemiskinan dilihat dari sisi ekonomi. Pertama, dari segi mikro yaitu kemiskinan terjadi karena adanya ketidaksamaan kepemilikan sumber daya, sehingga

mengakibatkan distribusi yang tidak merata dalam masyarakat. Sumber daya yang dimiliki penduduk miskin hanyalah terbatas dan mempunyai kualitas rendah. Berbeda dengan penduduk kaya yang mempunyai memiliki sumber daya yang banyak dan mempunyai kualitas yang bagus. Kedua, terjadinya kemiskinan karena akibat perbedaan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Perbedaan kualitas SDM disebabkan karena adanya nasib yang kurang beruntung, rendahnya pendidikan yang didapat, dan diskriminasi, atau karena keturunan.

Sementara itu, penyebab ketiga yaitu, kemiskinan muncul karena perbedaan akses dalam modal. Ketiga penyebab tersebut bermuara pada teori lingkaran setan kemiskinan. Adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar dan kurangnya modal yang menyebabkan rendahnya produktivitas seseorang. Produktivitas yang rendah mengakibatkan rendahnya upah yang diterima. Upah yang rendah tentunya dalam menabung dan berinvestasi akan kesulitan. Investasi yang rendah akan berakibat pada keterbelakangan dan seterusnya (Kuncoro, 2010: 69).

Menurut Todaro, kemiskinan yang terjadi di negara berkembang disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya: 1) perbedaan geografis, jumlah penduduk, dan tingkat pendapatan, 2) perbedaan sejarah, 3) perbedaan kekayaan sumber daya alam dan kualitas sumber daya manusia, 4) adanya perbedaan peranan sektor

swasta dan negara, 5) adanya perbedaan struktur industri, 6) adanya perbedaan derajat ketergantungan pada kekuatan ekonomi dan politik dan kelembagaan dalam negeri (Todaro, 2000: 37).

Selain itu, kemiskinan juga dapat disebabkan oleh empat penyebab, yaitu rendahnya taraf pendidikan. Apabila seseorang mempunyai taraf pendidikan yang rendah akan mengakibatkan terbatasnya kemampuan seseorang untuk mengembangkan diri, sehingga berdampak pada kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan. Kedua, rendahnya taraf kesehatan. Apabila seseorang mempunyai taraf kesehatan yang rendah tentunya aktivitas pekerjaan yang dilakukan fisik akan berpengaruh juga dan menyebabkan pekerjaan terganggu.

Ketiga, terbatasnya lapangan kerja. Apabila seseorang mendapatkan lapangan pekerjaan atau kegiatan usaha, tentunya kemiskinan yang terjadi akan terhindari. Keempat, kondisi terisolasi. Banyak penduduk yang masih berada pada kondisi miskin, dikarenakan tinggal ditempat yang jauh (terpencil dan terisolasi) dari pelayanan publik dan fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Oleh karena itu, mereka tidak dapat mendapatkan manfaat dari fasilitas yang diberikan (Kartasmita, 1996:240-241).

d. Kemiskinan menurut Islam

Islam biasanya menyandingkan miskin dengan fakir. Secara umum sebenarnya fakir dan miskin memiliki arti yang sama yaitu orang yang hidup melarat dan tidak dapat memenuhi kebutuhan sehingga membutuhkan bantuan. Beberapa ulama mendefinisikan fakir sebagai orang yang tidak punya apa-apa dan harta yang dimilikinya tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya. Sedangkan orang miskin ialah orang yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya mencapai separuh atau lebih tetapi tidak dapat memenuhinya secara penuh. (Jusmaliani, 2005: 125).

Adapun penyebab kemiskinan yaitu terjadinya perbedaan pendapatan. Keberadaan masyarakat yang memiliki penghasilan yang berbeda-beda sesungguhnya tidak dapat dinafikan. Oleh sebab itu, dalam Islam tidak pernah berbicara tentang upaya untuk “menghilangkan” kemiskinan, akan tetapi berbicara tentang bagaimana kemiskinan tersebut dapat direduksi dan diminimalisir agar kehidupan masyarakat menjadi lebih sejahtera. Caranya adalah dengan saling tolong-menolong antar masyarakat, saling membantu antar sesama, saling bersilaturahmi, saling mengisi dan saling bersinergi (Beik dan Arsyianti, 2016: 70). Selain itu, upaya penanggulangan kemiskinan dalam ajaran Islam dapat dilakukan dengan dua cara yaitu melalui persuasif seperti memberikan zakat,

infak dan sedekah dan melalui preventif seperti berusaha dan bekerja keras.

2. Pertumbuhan Ekonomi

a. Definisi Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi sebagai suatu ukuran kuantitatif dalam menggambarkan kondisi perekonomian suatu wilayah atau negara antara tahun saat itu dengan tahun sebelumnya. Menurut Kuznet dalam Todaro, pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai kenaikan kapasitas dalam jangka panjang di suatu negara untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduk di negara bersangkutan. Terdapat tiga komponen utama dari pertumbuhan ekonomi yaitu akumulasi modal, pertumbuhan penduduk, dan kemajuan teknologi. Akumulasi modal ini berbentuk investasi baru yang berupa tanah, peralatan fisik, dan sumber daya manusia. Pertumbuhan penduduk yang terjadi di suatu negara akan menambah jumlah angkatan kerja. Selanjutnya, dengan terjadinya kemajuan teknologi di suatu negara maka akan mempermudah dalam menjalankan pekerjaan.

Selain itu, terdapat tiga aspek yang perlu diperhatikan dalam pertumbuhan ekonomi, yaitu proses *output* per kapita, dan jangka panjang. Artinya, pertumbuhan ekonomi adalah proses yang menggambarkan perkembangan ekonomi dari waktu ke waktu yang bersifat dinamis, *output* per kapita mengaitkan aspek *output*

total dengan jumlah penduduk, dan jangka panjang menunjukkan kecenderungan perubahan perekonomian dalam jangka waktu tertentu dan asanya dorongan oleh perubahan intern perekonomian (Boediono, 1982:1).

b. Ukuran Pertumbuhan Ekonomi

Menurut BPS, indikator yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi pada suatu wilayah dengan menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan jumlah nilai barang dan jasa yang diproduksi di suatu wilayah (regional) tertentu dalam waktu tertentu tanpa melihat faktor kepemilikan. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah diperoleh dari naiknya PDRB atas dasar harga konstan dari suatu tahun terhadap tahun sebelumnya yang mencerminkan kenaikan produksi barang dan jasa di suatu wilayah.

c. Teori Pertumbuhan Ekonomi

Secara umum dalam perkembangannya teori pertumbuhan dapat dibedakan menjadi tiga pemikiran yaitu teori pertumbuhan Harrod Domar, teori pertumbuhan Neoklasik dan teori pertumbuhan *Endogen* (Idris, 2016:53) yaitu akan dijelaskan sebagai berikut:

1) Teori Pertumbuhan Harrod Domar

Teori ini merupakan pengembangan dari teori ekonomi makro Keynes dalam kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Menurut Harrod Domar faktor penting dalam

menentukan pertumbuhan ekonomi yaitu pembentukkan modal. Pembentukkan modal tersebut diperoleh dari akumulasi tabungan yang dilakukan oleh penduduk sehingga bermanfaat bagi kegiatan investasi (Gillis, dkk, 1992; Solow, 1994 dalam Idris, 2016: 54).

2) Teori Pertumbuhan Neoklasik

Teori ini dikembangkan oleh Solow (1956) dan pengikutnya didominasi oleh pemikiran mengenai pertumbuhan pendapatan per kapita jangka panjang dan perkembangan yang semakin meningkat (Idris, 2016: 55). Menurut teori ini, pertumbuhan ekonomi tergantung pada penambahan faktor-faktor produksi (penduduk, tenaga kerja dan akumulasi modal) dan tingkat kemajuan teknologi (Lincoln, 1999:62). Teori ini muncul untuk mengkritisi pendapat Harrod Domar mengenai pertumbuhan yang stabil. Menurut teori Neoklasik keseimbangan dalam pertumbuhan ekonomi tidak kaku seperti pendapat Harrod dan Domar. Perbandingan antara modal dan tenaga kerja (K/L) pada teori Harrod Domar dianggap tetap sedangkan pada teori Neoklasik dianggap fleksibel karena terdapat pengaruh dalam perkembangannya.

3) Teori Pertumbuhan Endogen

Teori pertumbuhan endogen ini muncul untuk mengkritik teori pertumbuhan neoklasik. Teori pertumbuhan endogen ini juga

dikenal dengan teori pertumbuhan baru. Teori endogen merupakan teori pertumbuhan yang menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses yang bersumber dari dalam suatu sistem (Romer, 1996; Barro dan Martin, 1999).

d. Pertumbuhan ekonomi dalam Islam

Pertumbuhan ekonomi dalam Islam tidak sekadar terkait peningkatan volume barang dan jasa, namun berkaitan dengan aspek moralitas dan kualitas akhlak serta keseimbangan antara tujuan duniawi dan ukhrawi. Ukuran keberhasilan pertumbuhan ekonomi tidak semata-mata dilihat dari sisi pencapaian materi semata, akan tetapi dari sisi perbaikan kehidupan agama, sosial dan kemasyarakatan (Beik dan Arsyianti, 2015: 23). Jadi peningkatan pertumbuhan ekonomi juga harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, sehingga mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan sesuai ajaran ekonomi Islam.

Pertumbuhan ekonomi dalam Islam memiliki tujuan pokok yaitu dengan cara tidak hanya melihat pertumbuhan kekayaan sebagai sesuatu yang terpisah dari distribusinya dan terjadinya keadilan sosial. Karena di dalam Islam untuk merealisasikan pertumbuhan ekonomi harus terdistribusi secara merata. Di sisi lain, Islam mendorong agar hasil dari produksi dapat memenuhi kebutuhan kebutuhan pokok semua lapisan masyarakat dengan

sejumlah komoditas yang diperlukan dalam tingkat berimbang untuk keseluruhan dalam mendapatkannya (Huda, 2015: 125).

Selain itu, tercapainya distribusi yang merata tentunya dilakukan secara adil (keadilan). Keadilan tersebut akan terwujud dengan mengeluarkan zakat. Pengeluaran zakat disini dilakukan oleh golongan orang kaya kepada golongan orang miskin. Karena zakat itu sendiri memiliki tujuan untuk kesejahteraan sosial. Adanya zakat dapat membantu penduduk miskin terhindar dari kemiskinan. Zakat yang diperoleh nantinya akan digunakan untuk membuka lapangan usaha.

3. Indeks Pembangunan Manusia

a. Indeks Pembangunan Manusia

Salah satu alat ukur untuk menilai kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) adalah dengan menggunakan *Human Development Index* (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM ini adalah konsep yang pertama kali diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 1990. Konsep tersebut menggabungkan antara indeks harapan hidup, indeks pendidikan, dan indeks daya beli (Beik, 2015: 147).

Menurut BPS, IPM sebagai alat ukur tingkat pencapaian pembangunan manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil dari pembangunan seperti pendapatan,

kesehatan, dan pendidikan dan sebagainya. IPM merupakan gabungan dari tiga komponen yang mengindikasikan kualitas sumber daya manusia. Komponen tersebut seperti umur panjang dan hidup sehat (harapan hidup), pengetahuan (pendidikan) dan standar hidup layak (daya beli).

Dimensi umur panjang dan hidup sehat diwakili oleh indikator harapan hidup saat lahir. Dimensi pengetahuan diwakili oleh indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Sedangkan dimensi standar hidup layak diwakili oleh pengeluaran per kapita. Ketiga unsur ini sangatlah penting dalam menentukan kemampuan suatu Kabupaten/kota untuk meningkatkan IPMnya. Selain itu, ketiga unsur ini saling mempengaruhi satu sama lain (Suwandi, 2015: 157).

Dalam konsep pembangunan manusia yang dikembangkan oleh UNDP, menetapkan kinerja pembangunan dalam skor berkisar 0 dan 1 yang dikelompokkan menjadi 4 kategori yaitu:

- 1) Sangat Tinggi : nilai IPM lebih dari 0.800
- 2) Tinggi : nilai IPM antara 0.660 -0.799
- 3) Menengah : nilai IPM antara 0.500-0.659
- 4) Rendah : nilai IPM kurang dari 0.550

b. Indeks Pembangunan Manusia dalam Islam

Menurut pandangan Islam, pembangunan manusia lebih menekankan pada manusia itu sendiri untuk berperan dalam proses

pembangunan. Peran manusia tersebut salah satunya adalah untuk mencari ilmu sebanyak-banyaknya dalam pendidikan. Dengan demikian manusia akan mempunyai kualitas hidup yang baik karena ketrampilan dan pengetahuannya meningkat sehingga nantinya akan dijauhkan dari kemiskinan.

Dalam buku *Falsafah At Tarbiyyah Al Islamiyyah* (Filosofi Pendidikan Islam), Omar M Al Tauny menyatakan bahwa tujuan dari pendidikan dalam Islam adalah sebagai berikut (Beik dan Arsyianti, 2016: 150-151):

- 1) Untuk membantu pembentukkan akhlak yang mulia. Dengan demikian, maka *akhlakul karimah* merupakan jiwa dari setiap pendidikan Islam.
- 2) Untuk mempersiapkan anak didik dalam mempersiapkan kehidupan di dunia dan akhirat secara bersama-sama.
- 3) Mempersiapkan anak didik dalam memelihara ruh ilmiah (*scientific spirit*) dan untuk mempersiapkan dalam mencari dan menemukan sesuatu (*curiosty*).
- 4) Mempersiapkan anak didik dalam menguasai keahlian tertentu sesuai dengan ketrampilan dan kemampuan .
- 5) Mempersiapkan anak didik agar memiliki rasa tanggung jawab dalam hidupnya sebagai hamba Allah dan sebagai makhluk sosial.

- 6) Mengajak anak didik agar dapat memahami hikmah dengan diciptakannya alam semesta dan memanfaatkannya dengan sebaik dan seoptimal mungkin.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa agar manusia menjadi produktif maka dianjurkan untuk mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Namun dalam mencari ilmu tersebut tidak hanya dilihat dari duniawi saja akan tetapi juga dilihat dari akhirat. Dengan demikian adanya keseimbangan antara dunia dan akhiratnya.

4. Upah Minimum

a. Upah Minimum

Upah minimum adalah upah minimal yang wajib diberikan kepada para pekerja sebagai hak seorang pekerja. Tingkat upah minimum untuk suatu daerah disebut tingkah upah minimum kabupaten (UMK). Dimana setiap daerah memiliki umk yang berbeda-beda (Suparmoko, 2000: 185). Upah minimum dapat meningkatkan standar kehidupan pekerja karena mengurangi kewenang-wenangan para majikan dalam merekrut dan membayar upah para pekerja. Akan tetapi, upah minimum juga dapat meningkatkan pengangguran (Wirawan, 2015:394). Karena dengan ditetapkannya upah minimum pada perusahaan, maka perusahaan tersebut dapat meningkatkan kualitas karyawan atau buruh yang akan direkrut dengan standar yang sudah ditetapkan. Apabila

karyawan atau buruh tidak termasuk ke dalam standar yang telah ditetapkan maka tidak mendapatkan pekerjaan.

Berbagai teori dikemukakan oleh para ahli ekonomi modern mengenai penentuan upah. Menurut *subsistence theory*, upah cenderung mengarah ke suatu tingkat yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan minimum pekerja dan keluarganya. *Wages fund theory* menyatakan bahwa upah tergantung pada permintaan dan penawaran tenaga kerja. *Residual claimant theory* menyatakan bahwa upah adalah sisa jika seluruh imbalan bagi faktor produksi yang lain telah dibayarkan. Menurut *marginal productivity theory*, dalam kondisi persaingan sempurna, setiap pekerja yang memiliki *skill* dan efisiensi yang sama dalam suatu kategori akan menerima upah yang sama dengan VMP (*value of marginal product*) jenis pekerjaan yang bersangkutan. Artinya, tidak ada kesepakatan di antara para ahli ekonomi mengenai masalah bagaimana upah ditetapkan (Chaudhry, 2012: 198).

Menurut *International Labor Organization* (ILO) tujuan dari upah minimum (Biju Varkkey dan Rupa Korde, 2012 dalam Wirawan) adalah sebagai berikut:

- 1) Menyediakan proteksi untuk sejumlah pekerja berupah rendah yang dipertimbangkan yang posisinya mudah kena tekanan dalam pasar tenaga kerja.
- 2) Untuk memastikan pembayaran upah-upah yang adil.

- 3) Menyediakan suatu dasar bagi struktur upah dan mengurangi kemiskinan dengan menyediakan semua pekerja dengan net keamanan sebagai proteksi upah yang terlalu rendah.
- 4) Melayani sebagai instrumen kebijakan ekonomi dan meningkatkan distribusi pendapatan.

b. Upah Minimum menurut Islam

Dalam Islam, upah diartikan sebagai imbalan yang akan diterima seseorang setelah melakukan pekerjaan baik itu imbalan di dunia berupa materi maupun imbalan di akhirat berupa pahala. Di dalam islam, upah digolongkan menjadi dua jenis yaitu upah yang telah disebutkan (*ajrul musamma*) dan upah yang sepadan (*ajrul mitsil*). Upah yang telah disebutkan ini merupakan upah yang telah disepakati diawal sebelum bekerja, akan tetapi dalam hal ini harus ada kerelaan antara kedua belah pihak. Sedangkan upah yang sepadan merupakan upah yang ditentukan sesudah melakukan pekerjaan sesuai dengan hasil pekerjaan (Nurul Huda, dkk. 2008: 199).

Menurut Islam, penetapan upah harus dilakukan secara layak dan adil. Artinya, pemberian upah ini tidak boleh merugikan satu sama lain dan harus menunjukkan pula keadilan dan kebaikan dalam hubungan mereka sehingga perlakuannya pun berbeda bukan antara tuan dan hamba akan tetapi sebagai saudara (Chaudhry: 2016: 198). Menurut Sholihin (2010), Adil bermakna

jelas dan transparan. Prinsip dari keadilan yaitu terletak pada kejelasan akad atau transaksi dan komitmen untuk melakukannya. Transparan yang dimaksudkan adalah berapa upah yang diterima dikatakan sebelum pekerjaan dimulai.

Sedangkan penetapan upah harus layak yang dimaksudkan adalah kelayakan penerimaan upah sesuai dengan keadaan pasaran. Upah yang diberikan kepada pekerja tidak boleh merugikan antara satu dengan yang lain dengan mengurangi hak yang seharusnya diperoleh. Selain itu, dikatakan layak apabila pemberian upah kepada pekerja tidak boleh dibawah upah yang biasanya diberikan sesuai dengan pekerjaan. Karena pemberian upah dibawah batas minimum bertentang dengan moral sehingga dimensi akhirat tidak akan didapatkan majikan jika dibawah standar minimum (Ridwan, 2013: 256).

5. Inflasi

a. Definisi Inflasi

Inflasi merupakan kecenderungan dari harga-harga yang mengalami kenaikan dan berlangsung terus menerus (Mankiw, 2011). Menurut Badan Pusat Statistik (2014), inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dimana barang dan jasa tersebut termasuk kedalam kebutuhan pokok masyarakat atau dapat diartikan sebagai turunnya daya jual mata uang suatu negara.

Menurut Sukirno, definisi Inflasi mengandung tiga aspek yaitu (Sukirno, 1994: 21): (1) terdapat kecenderungan harga untuk meningkat, yang artinya mungkin tingkat harga terjadi aktual pada waktu tertentu turun atau naik dibandingkan waktu sebelumnya, tetapi ada kecenderungan meningkat, (2) adanya kenaikan harga secara terus menerus, (3) kenaikan harga umum. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa inflasi adalah terjadinya kenaikan barang dan jasa seperti kebutuhan pokok secara bersamaan. Dengan kenaikan Inflasi tersebut mengakibatkan daya beli masyarakat mengalami penurunan karena nilai mata uang terhadap barang juga mengalami penurunan. Sehingga mendorong penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan bertambah.

b. Macam-macam Inflasi

Menurut jenisnya, inflasi di bagi menjadi 4 macam yaitu sebagai berikut:

1) Inflasi dari segi parah atau tidaknya

Pada inflasi jenis ini dapat dilihat seberapa besar laju tingkat inflasi dalam suatu periode tertentu yang dibedakan menjadi:

- a) Inflasi Ringan adalah inflasi yang laju pertumbuhannya kurang dari 10 persen per tahun.
- b) Inflasi Sedang adalah inflasi yang laju pertumbuhannya antara 10 persen sampai dengan 30 persen per tahun

- c) Inflasi Berat adalah inflasi yang laju pertumbuhannya antara 30 persen sampai dengan 100 persen per tahun
 - d) Hiper Inflasi adalah inflasi yang laju pertumbuhannya lebih dari 100 persen per tahun
- 2) Inflasi dari segi tingkat intensitasnya

Pada inflasi jenis ini menitikberatkan pada cepat tidaknya laju inflasi yang di bedakan sebagai berikut :

- a) Inflasi yang merayap adalah inflasi yang ditandai dengan kenaikan harga barang dipasaran berjalan lamban dengan presentase yang kecil dan mengalami jangka waktu yang relatif lama.
- b) Inflasi menengah adalah kenaikan harga barang dipasaran mengalami kenaikan yang cukup besar.
- c) Inflasi tinggi adalah kenaikan harga barang dipasaran sebesar 5 sampai 6 kali dan termasuk inflasi yang paling parah. Pada kondisi ini tingkat perputaran uang sangatlah cepat dikarenakan masyarakat enggan menyimpan ataupun memegang uang tunai. Hal ini disebabkan nilai uang sangat rendah sehingga masyarakat banyak yang menukarkan uangnya dengan barang.

3) Inflasi dari segi asalnya

Terdapat beberapa macam inflasi dari segi asalnya yaitu sebagai berikut:

- a) Inflasi domestik adalah inflasi yang terjadi karena adanya gejala moneter dari dalam negeri, yang bisa disebabkan karena perilaku pemerintah atau bukan pemerintah.
- b) Inflasi dari luar adalah inflasi yang terjadi karena adanya variabel yang mempengaruhi dari luar negeri.

4) Inflasi dari segi penyebabnya

Pada inflasi ini dibagi menjadi tiga bagian yaitu sebagai berikut:

- a) Inflasi permintaan adalah inflasi yang muncul karena adanya ketidakseimbangan antara permintaan terhadap barang dan jasa, sehingga mengakibatkan kenaikan harga.
- b) Inflasi dorongan penawaran adalah inflasi yang muncul karena adanya desakan kenaikan biaya produksi seperti kenaikan upah pada buruh.
- c) Inflasi campuran adalah inflasi yang muncul karena pengaruh dari permintaan dan penawaran agregat.

c. Metode Pengukuran Inflasi

Kenaikan dalam inflasi dapat dilakukan pengukuran menggunakan indeks harga. Terdapat beberapa indeks harga yang dapat digunakan untuk mengukur laju inflasi (Nopirin, 1987) antara lain (Idris, 2016: 127-128):

1) *Consumer Price Index (CPI)*

Indeks ini bertujuan untuk mengukur biaya atau pengeluaran rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan hidup. Adapun rumus untuk menghitung CPI yaitu sebagai berikut:

$$\text{CPI} = \left(\frac{\text{Cost of marketbasket in given year}}{\text{Cost of marketbasket in base year}} \right) \times 100\%$$

2) *Produsen Price Index*

Produsen price index atau yang dapat disebut juga dengan *who sale price index*. Indeks ini mengutamakan pada perdagangan yang besar misalnya harga bahan mentah dan bahan baku atau barang setengah jadi.

3) GNP Deflator

Indeks GNP deflator ini berbeda dengan indeks CPI dan PPI, dimana indeks ini mencakup jumlah barang dan jasa yang termasuk dalam hitungan GNP, sehingga jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan kedua indeks diatas. Indeks ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{GNP Deflator} = \left(\frac{\text{GNP Nominal}}{\text{GNP Rill}} \right) \times 100\%$$

d. Inflasi menurut Islam

Menurut Al-Maqrizi, inflasi merupakan dapat terjadi ketika adanya kenaikan harga-harga secara umum dan berlangsung secara terus-menerus. Terjadinya inflasi mengakibatkan kelangkaan pada persediaan barang dan jasa. Apabila konsumen membutuhkan barang dan jasa maka perlu adanya pengeluaran uang yang lebih agar mendapatkannya (Karim, 2004:390). Sehingga dalam sistem Islam, Inflasi adalah kondisi yang ingin dikurangi.

Terjadinya inflasi menyebabkan seseorang menjadi bertindak tidak adil walaupun tidak disengaja, dengan memerosotkan daya beli aset-aset moneter secara tidak diketahui. Hal tersebut tentunya akan mengakibatkan rusaknya efisiensi moneter dan menimbulkan ongkos kesejahteraan pada masyarakat dengan meningkatkan konsumsi dan mengurangi tabungan. Selain itu, inflasi juga dapat menimbulkan buruknya iklim ketidakpastian di mana keputusan ekonomi akan diambil, akan menimbulkan kekhawatiran formasi modal dan menyebabkan misalokasi sumber daya. Hal tersebut cenderung merusak nilai-nilai, munculnya usaha-usaha spekulasi (yang tidak disukai Islam) yang mengakibatkan kerugian pada aktivitas produktif (yang digalakkan Islam) dan ketidakmerataan pendapatan semakin parah (yang dikutuk Islam) (Chapra, 2000: 5).

Selain itu, para ekonomi Islam menyatakan bahwa Inflasi mengakibatkan buruknya kondisi perekonomian diantaranya sebagai berikut (Karim, 139):

- 1) Menimbulkan gangguan fungsi uang yaitu seperti fungsi tabungan (nilai simpanan), fungsi dari pembayaran di muka dan fungsi dari satuan hitung.
- 2) Melemahnya keinginan untuk menabung masyarakat (turunnya *marginal propensity to save*).
- 3) Meningkatkan kecenderungan dalam berbelanja kebutuhan non-primer dan barang-barang mewah (naiknya *marginal propensity to consumer*).
- 4) Mengarah ke investasi yang tidak produktif yaitu penumpukan kekayaan seperti tanah, bangunan, logam mulia, mata uang asing dengan mengorbankan investasi yang produktif seperti pertanian, industrial, perdagangan, transportasi, dan lainnya.

C. Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, landasan teori yang telah dijelaskan di atas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Kemiskinan

Pertumbuhan ekonomi merupakan faktor yang dapat berpengaruh terhadap kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi ini dapat

dilihat dari meningkatnya PDB untuk nasional dan PDRB untuk daerah. Apabila pertumbuhan ekonomi mengalami pertumbuhan yang positif akan berpengaruh terhadap tersedianya lapangan kerja. Lapangan kerja yang banyak tersedia akan mengurangi jumlah penduduk miskin di suatu wilayah karena mereka bekerja.

Menurut penelitian dari Windra, Pan Budi, dan Yudi (2016) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan dan negatif terhadap tingkat kemiskinan. Artinya, apabila terjadi peningkatan terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 1 persen maka akan menyebabkan kemiskinan menurun sebesar 1 persen. Sehingga dapat ditarik hipotesis yaitu:

H1 : Diduga Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh signifikan dan negatif terhadap tingkat Kemiskinan

2. Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Kemiskinan

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indikator untuk mengukur kualitas modal manusia dan juga kesejahteraan sosial. Jika suatu daerah mempunyai IPM yang rendah maka mengindikasikan bahwa pendidikan dan kesehatan pada daerah tersebut rendah dan sebaliknya. Rendahnya tingkat pendidikan akan mengakibatkan seseorang kesulitan mendapatkan pekerjaan karena memiliki kualitas yang rendah. Hal tersebut akan berimbas juga terhadap jenis pekerjaan yang didapat dan juga penghasilan yang diperoleh. Seseorang yang memperoleh penghasilan rendah dalam memenuhi kebutuhan hanya

dapat mencukupi kebutuhan konsumsi saja tanpa dapat memenuhi kebutuhan seperti pendidikan dan kesehatan dalam jangka waktu terus menerus taraf hidup seseorang seperti itu atau tidak mengalami taraf hidup yang membaik, seseorang masih akan hidup dilingkaran kemiskinan.

Menurut Kotambunan, Palar, dan Tumilaar (2016) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh signifikan dan negatif terhadap tingkat kemiskinan. Hal ini berarti apabila IPM naik maka menurunkan tingkat kemiskinan. Sehingga dapat ditarik hipotesis yaitu:

H2 : Diduga Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh signifikan dan negatif terhadap tingkat Kemiskinan.

3. Pengaruh Upah Minimum terhadap Kemiskinan

Upah merupakan suatu bentuk balas jasa yang diberikan kepada karyawan atau pekerja. Dengan upah maka seseorang dapat memenuhi standar hidup minimum (kesehatan, efisiensi, dan kesejahteraan pekerja). Selain itu, semakin tinggi tingkat upah dapat meningkatkan pendapatan pada masyarakat sehingga pemenuhan standar hidup pun tercapai dan dapat mengentas kemiskinan.

Dalam penelitian Riva, Kadir, dan Setiawan (2014) menunjukkan bahwa upah minimum berpengaruh signifikan dan negatif terhadap kemiskinan. Artinya, apabila upah minimum

mengalami kenaikan maka akan berpengaruh menurunnya angka kemiskinan. Sehingga dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

H3 : Diduga Upah Minimum berpengaruh signifikan dan negatif terhadap tingkat Kemiskinan.

4. Pengaruh Inflasi terhadap Kemiskinan

Inflasi yang tinggi menyebabkan naiknya harga barang-barang secara umum. Kenaikan ini tentunya berpengaruh pada cara masyarakat dalam memenuhi kebutuhan. Masyarakat akan mengurangi kebutuhan sehari-harinya karena upah yang digajikan kepada karyawan atau pekerja sama seperti sebelum terjadinya inflasi. Padahal inflasi mengakibatkan harga kebutuhan sehari-hari menjadi mahal.

Selain itu, kenaikan harga-harga kebutuhan hidup yang dapat tidak terkendali akan mempengaruhi daya beli masyarakat. Karena pendapatan masyarakat juga mengalami penurunan. Jadi, adanya inflasi di tahun yang bersangkutan mengalami kenaikan sebesar 5 persen maka akan berpengaruh terhadap penurunan pendapatan sebesar 5 persen. Akibatnya, daya beli masyarakat akan mengalami penurunan juga sebesar 5 persen (Arsyad, 2002:254). Sehingga penduduk miskin pun bertambah.

Dalam penelitian Fitri Amalia (2012) menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Selain itu, penelitian Windra, Marwanto dan Rafani (2016) menunjukkan bahwa

inflasi berpengaruh positif terhadap kemiskinan. Hal ini berarti jika inflasi meningkat maka akan menyebabkan kemiskinan meningkat pula. Sehingga ditarik hipotesis sebagai berikut:

H4 : Diduga Inflasi berpengaruh signifikan dan positif terhadap tingkat Kemiskinan.